

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

1. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Januari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,36% (mtm). Inflasi tahunan sebesar 0,92% (yoy) dan deflasi tahun kalender (ytd) s.d. Januari 2025 sebesar 0,36%. Komoditi penyumbang utama deflasi bulan Januari 2025 secara *m-to-m* antara lain: Tarif Listrik, Tomat, Telur Ayam Ras, Bawang Merah dan Angkutan Udara. Sedangkan komoditi penyumbang utama inflasi tahunan (y-on-y) bulan Januari 2025 didominasi komoditi makanan antara lain: Cabai Merah, Minyak Goreng, Cabai Rawit, Bawang Merah, Daging Ayam Ras, dan Bawang Putih. Non makanan: Emas Perhiasan dan Bahan Bakar Rumah Tangga.
2. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Februari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,41% (mtm). Deflasi tahun kalender (ytd) s.d. Februari 2025 sebesar 0,77% dan Inflasi tahunan sebesar 0,49% (yoy). Inflasi Bulanan disebabkan oleh beberapa komoditas utama yaitu Emas Perhiasan, Bahan Bakar Rumah Tangga, Cabai Rawit, Angkutan Udara, dan Bensin. Sedangkan Inflasi Tahunan disebabkan oleh beberapa komoditas utama yaitu Emas Perhiasan, Bahan Bakar Rumah Tangga, dan Minyak Goreng.
3. Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Selatan pada bulan Maret 2025 mengalami Inflasi sebesar 1,53%. Inflasi Tahun Kalender (kumulatif) sampai bulan Maret 2025 sebesar 0,75% dan Infasi tahunan sebesar 1,77% (yoy). Komoditi dominan yang menyebabkan terjadinya inflasi bulan Maret 2025 antara lain: Tarif Listrik, Bawang Merah, Emas Perhiasan, Bawang Putih, dan Daging Ayam Ras. Komoditi yang dominan menyebabkan inflasi tahunan antara lain Emas Perhiasan, Bawang Merah, Bahan Bakar Rumah Tangga, Minyak Goreng, dan Bawang Putih.
4. Tingkat Inflasi daerah IHK di Wilayah Sumatera Selatan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2025, sebagai berikut:

BULAN	TINGKAT INFLASI KOTA PALEMBANG (%)		TINGKAT INFLASI KOTA LUBUK LINGGAU (%)		TINGKAT INFLASI KAB MUARA ENIM (%)		TINGKAT INFLASI KAB OKI (%)		TINGKAT INFLASI PROVINSI SUMATERA SELATAN (%)	
	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)	(mtm)	(yoy)
JAN	-0,47	0,78	-0,64	0,50	-0,02	1,00	-0,03	1,57	-0,36	0,92
FEB	-0,30	0,27	-0,13	0,16	-1,02	0,91	-0,44	1,25	-0,41	0,49
MARET	1,52	1,32	1,41	1,28	1,40	3,03	1,68	2,91	1,53	1,03

Selama Triwulan I, tingkat inflasi di keempat kota IHK terkendali dengan baik dan sesuai dengan target capaian  $2,5\% \pm 1\%$ .

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Pada Triwulan I tahun 2025, ketidakpastian global yang disebabkan oleh konflik di sejumlah negara penghasil energi dan pangan utama dunia telah memberikan dampak signifikan terhadap kestabilan harga berbagai komoditas, baik secara global maupun domestik. Ketegangan geopolitik di negara-negara tersebut mengakibatkan gangguan pasokan yang

mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas penting di dalam negeri. Beberapa komoditas yang mengalami kecenderungan kenaikan harga antara lain emas perhiasan, minyak goreng, bahan bakar rumah tangga, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, cabai merah, dan cabai rawit.

Kenaikan harga emas perhiasan dipicu oleh meningkatnya permintaan global terhadap emas sebagai aset lindung nilai di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu. Selain itu, fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga turut mendorong kenaikan harga emas perhiasan di pasar domestik. Di sisi lain, harga minyak goreng juga mengalami peningkatan akibat kenaikan harga bahan baku minyak nabati seperti kelapa sawit dan kedelai di pasar global. Keterbatasan pasokan, peningkatan konsumsi domestik menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah, serta kebijakan ekspor dari negara produsen turut menjadi faktor penyumbang naiknya harga minyak goreng di pasaran.

Selain emas perhiasan dan minyak goreng, kebutuhan telur dan daging ayam serta komoditi beberapa jenis cabean yang semakin meningkat dan juga menjelang lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah menyebabkan kenaikan harga. Telur ayam ras dari harga semula berkisar Rp. 23.000-25.000/ kg, menjelang lebaran bisa mencapai Rp. 30.000/kg. untuk daging ayam di hari biasa berkisar Rp. 24.000/kg- Rp/ 26.000/kg, menjelang bulan Puasa/lebaran dapat mencapai Rp. 30.000 - Rp. 40.000 / kg. Sedangkan untuk komoditi cabe, contoh cabe merah keriting biasanya diharga Rp 45.000 - Rp. 55.000/kg saat menjelang ramadhan dan hari raya bisa mencapai Rp. 75.000 - 90.000/kg. begitu juga halnya dengan jenis cabe rawit rentang harga mulai dari Rp. 90.000 - Rp. 110.000/kg.

Untuk mengantisipasi keresahan dan berkurangnya kemampuan daya beli di masyarakat yang berpenghasilan rendah, Pemerintah Pusat berupaya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah dalam upaya mengendalikan inflasi daerah agar kondisi di masyarakat tetap aman terhindar dari gejolak kenaikan harga dari beberapa bahan pangan pokok dan barang penting lainnya melalui pemanfaatan anggaran dengan perencanaan pemanfaatan anggaran lebih atau ditambah dalam rangka pengendalian inflasi daerah. Pada triwulan pertama tahun 2025 kondisi tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan masih berada pada target nasional Tahun 2025 yaitu  $2,5 \pm 1\%$  (1,5% - 3,5%).

### 3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui TPID pada Tahun 2025 triwulan I telah memiliki rencana kegiatan di Tahun 2025 sesuai dengan Roadmap TPID Provinsi Sumatera Selatan. Sesuai dengan arahan Pj. Gubernur Sumatera Selatan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat terhadap komoditi pangan penting, melalui inisiasi dari TPID Provinsi Sumatera Selatan untuk menggiatkan Operasi Pasar Murah yaitu (Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak Se-Sumatera Selatan), bekerjasama Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten/kota bekerjasama dengan BUMD maupun BUMN.

Berikut beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh TPID Provinsi Sumatera Selatan dan akan dilakukan pada Triwulan I (pertama) tahun 2025 dalam upaya Pengendalian Inflasi Daerah melalui strategi 4K :

#### 1. Upaya pemenuhan **Ketersediaan pasokan** melalui;

Pelaksanaan monitoring harga dan sidak pasar oleh TPID Provinsi Sumatera Selatan bersama Satgas Pangan Polda Sumsel untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga minyak goreng;

- Pemantauan harga dan stok melalui aplikasi Sistem Pemantauan Harga Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), Panel Harga, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), dan aplikasi lainnya untuk memastikan kebutuhan tersedia bersama Tim Satgas Pangan Polda dan Instansi terkait;
- Pelaksanaan sidak ke pasar, sidak gudang, dan sidak distributor terhadap komoditi andil inflasi antara lain; Beras, cabe, telur ayam ras, daging ayam ras, minyak goreng, gula pasir. Agar tidak menahan barang serta pengecekan stok barang dan harga bersama Satgas pangan Polda Sumsel, BI Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, aparat dan dinas/instansi terkait lainnya. Guna memastikan bahwa stok tersedia banyak dan mencukupi sehingga mencegah panic buying di masyarakat;
- Gerakan Tanam Cabai Merah dan Bawang Merah di Kebun Balai Pengembangan dan Produksi Benih Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Sumsel;
- Fasilitasi Distribusi Pangan dengan menambah pasokan yang dilakukan secara B to B untuk Komoditi cabai rawit merah dari daerah surplus di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan medan ke Provinsi Sumatera Selatan dikarenakan stok yang ada dari kota Pagaralam dan Lubuk Linggau belum mencukupi;
- Menentukan lokasi Cluster pengembangan cabai dan bawang merah pada lokasi sentra (Cabai : OKI, OKU Timur, Ogan Ilir, Muara Enim, Banyuasin), (Bawang Merah : Pagaralam).

2. Upaya **Keterjangkauan harga** melalui;

- Membuka Toko KEPO di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Prov. Sumsel dan Toko KEPO keliling yang menyediakan komoditas bahan pangan dengan harga terjangkau dan pasti lebih murah dari harga pasar;
- Kegiatan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) untuk komoditas beras medium oleh Perum Bulog Sumsel Babel;
- Pelaksanaan monitoring harga secara rutin ke pasar tradisional oleh TPID tingkat Provinsi maupun Kab/Kota;
- Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan menggelar Pasar Tani secara rutin setiap Rabu dan Jumat dengan menjual komoditi hortikultura dibawah harga pasar, seperti cabai besar, bawang merah dan cabai rawit;
- Melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) Pangan Pokok yang cenderung bergejolak pada tanggal 26 Februari 2025 bertempat di Halaman Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dengan harga dibawah HET/HAP;
- Pemasangan spanduk HET Rp 15.700,- Minyak Goreng “Minyak Kita” di Pasar-pasar Kota Palembang maupun Kab/Kota di Sumatera Selatan dan pemberian sanksi dan denda kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan harga penjual Minyak Kita berupa pasal 26 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

Kerjasama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Operasi Pasar Murah dengan BI Provinsi Sumatera Selatan, OJK Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Sumatera Selatan, BUMN dan BUMD Provinsi Sumatera Selatan di Halaman Monumen Perjuangan Rakyat (MONPERA) Palembang pada tanggal 21 Maret 2025.

### 3. Memastikan **Kelancaran distribusi** dengan;

1). Kerjasama (MoU) dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan melalui Kerjasama Antar Daerah untuk komoditi Bawang Merah antara lain dengan Provinsi Jawa Timur (Nganjuk), Nusa Tenggara Barat (Bima, Lombok), Bali, (Kab. Bangli), untuk komoditi Cabai Merah dengan Provinsi Bengkulu (Rejang Lebong, Curup), Enrekang, dan Makassar.

### 4. **Komunikasi yang efektif** melalui;

- Laporan harian pelaksanaan 9 langkah pengendalian inflasi daerah kepala Irjen Kemendagri dilaksanakan setiap hari kerja sebelum jam 14.00 melalui tautan : <https://bit.ly/waspengendalianinflasi2025>
- Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Capacity Building TPID Se-Sumatera Selatan tanggal 23 Januari 2025
- Pelaksanaan Rapat koordinasi dan rapat teknis Tim Pengendalian Inflasi Daerah secara periodik dan berkala setiap hari Senin setelah rakor inflasi yang dipimpin Mendagri secara virtual dan setiap hari kamis.
- Pelaksanaan rapat koordinasi secara rutin oleh TPID Provinsi Sumsel dan Kab/Kota
- Rapat melalui Zoom Daerah-Daerah yang mengalami kenaikan harga (IPH) selama periode mingguan berdasarkan laporan BPS Pusat
- TPID Prov. Sumsel secara rutin mengikuti zoom meeting bersama Rakormas Pengendalian Inflasi bersama Kemendagri setiap minggunya

*Memperkuat sinergi dan koordinai baik TPID di wilayah Provinsi Sumatera Selatan maupun Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).*

### 4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Pada Triwulan ke I, tingkat inflasi Provinsi Sumatera Selatan pada Bulan Maret 2025 (yoy) masih berada pada target capaian Nasional yaitu 1,77% tapi di atas tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,03%. Hal ini dikarenakan adanya penambahan 2 (dua) daerah kabupaten sebagai daerah IHK yang pada bulan Maret tingkat inflasi tahunannya berada di atas nilai target capaian nasional dengan rincian dari 4 Kab/kota IHK antara lain: Kota Palembang 1,32%, Kota Lubuk Linggau 1,28%, Kabupaten Ogan Komering Ilir 2,91%, dan Kabupaten Muara Enim 3,03%. Kabupaten Muara Enim dan Ogan Komering Ilir adalah daerah yang baru menjadi wilayah IHK selain Palembang dan Lubuk Linggau, dan sejak tahun 2024 perhitungan inflasi daerah tersebut telah menjadi perhitungan untuk Tingkat Inflasi Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pada triwulan pertama tahun 2025, TPID Provinsi Sumatera Selatan, mengikuti arahan Pj Gubernur Sumatera Selatan, telah menyelenggarakan Operasi Pasar Murah secara intensif. Kegiatan ini dilakukan dan bekerja sama dengan sejumlah BUMD milik Pemerintah Provinsi serta beberapa instansi vertikal seperti Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, BPKP Provinsi, DANDIM 0418, DENPOM II/Sriwijaya, dan juga Pemerintah Kota Palembang. Operasi ini digelar secara masif dari bulan Januari hingga Maret 2025. Fokus utama kegiatan ini adalah menyediakan kebutuhan pokok terutama komoditas pangan yang tergolong volatile foods — seperti beras, cabai merah, bawang merah dan putih, telur, gula pasir, serta minyak goreng — yang kerap menjadi penyumbang inflasi. Barang-barang tersebut dijual dengan harga di bawah harga pasar karena disubsidi melalui dana CSR dari BUMD milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Pelaksanaan

pasar murah ini bertujuan untuk meredam kenaikan harga pangan yang biasa terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, khususnya Idul Fitri 1445 H.

3. Pelaksanaan program GSMP Go To School (GTS) merupakan pengembangan dari Gerakan Sumsel Mandiri Pangan. Pada tahun 2024, kegiatan GSMP di tahun 2025 akan dilaksanakan dengan beberapa inovasi dengan melibatkan Tim PKK Kabupaten-Kota, yang pada awalnya GSMP memang diarahkan ke Rumah Tangga dan peran Tim PKK amat dibutuhkan.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pj. Gubernur Sumatera Selatan menghimbau kepada TPID kabupaten/kota agar terus melanjutkan upaya pengendalian inflasi Indeks Perkembangan Harga (IPH) dan Inflasi melalui kegiatan pada triwulan pertama, antara lain;

1. Menyampaikan himbauan kepada TPID Kab/Kota dalam rangka Pengendalian Inflasi di Provinsi Sumatera Selatan dan melakukan mitigasi ancaman bencana alam yang dapat mengakibatkan tingkat inflasi tidak terkendali
2. Menghimbau para Produsen beras agar menyerap gabah produksi petani dan memprioritaskan peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat Sumsel
3. Meminta para Bupati dan Walikota harus terus mewaspadai dan segera mengambil tindakan antisipatif untuk menekan laju inflasi
4. Meminta Bupati / Walikota untuk memastikan ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga di tingkat masyarakat dengan Pelaksanaan Operasi Pasar Murah.
5. Meminta Bupati / Walikota juga untuk memperkuat Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang dikembangkan dan dapat dilakukan secara masif, terkoordinir, sistematis, dan berkelanjutan oleh semua Bupati / Walikota sehingga dampak dirasakan langsung oleh masyarakat secara terus-menerus
6. Meminta Bupati / Walikota untuk menganalisa data/neraca potensi dan kebutuhan agar dapat memanfaatkan peluang dan kebutuhan daerahnya dengan membangun komunikasi dan kerjasama seluas-luasnya dengan daerah lain melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD)
7. Terus mewaspadai komoditas dominan Penyumbang Andil Inflasi dan Kenaikan Harga di Provinsi Sumatera Selatan terutama Beras. Segera mencari penyebab kenaikan harga dan ketersediaan pasokan, karena beras komponen yang sangat berpengaruh terhadap andil inflasi